

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechthar, O. 2017. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Harsono, Boedi, 2000, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok - pokok Agraria, Isi Pelaksanannya*, Jakarta: Djambatan.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 102
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, PT. Penerbitan Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mantayborbir, S. dan Jauhari Imam, 2003, *Hukum Pengurusan Hutang Piutang Negara Indonesia*, Jakarta Pustaka Bangsa.
- Muhammad dan Subandi Sadi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Parate, Satrio J., 1993, *Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan, Asas - Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah - Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan*, Bandung: Alumni.

- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali
- _____, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 8th edn, Bandung: Alfabeta.
- Adjie, H. (2023). *Relasi Hak Tanggungan, Lelang dan Cessie*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Aemanah, U., Sihombing, R., Yamani, Mangar, I., Tantar, F., Fitra, . . . Perwitasari, D. (2025). *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Arba, & Mulada, D. A. (2021). *Hukum Hak Tanggung: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda diatasnya*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksar).
- Ashibly. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Jajuli, S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang: A-Empat.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subagio, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.

Suparji. (2020). *JAMINAN KEBENDAAN DALAM PEMBIAYAAN*. Jakarta: UAI Press.

Sutarip, S. (2024). *Rekonstruksi Penganturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadian*. Semarang: CV Lawwana.

Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1338 ayat (1).

Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75.

Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

Anggraeni, L., Yunanto, & Sukma, N. M. (2020). PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN. *Notarius*, 13(2), 569-584.

Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2).

Asril, J. (2020). Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 492-510.

Atikah, I. (2020). Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(1), 15-38.

Azisah, N. (2024). Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 1(2), 71-85.

Budjang, C. B. (2018). Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta PPAT. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 89-107.

Dolly, D. (2016). Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1), 103-128.

Gunadi, S., & Artati, S. U. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK

- DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(1), 55-56.
- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Dalam Perjanjian kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1).
- Ibrahim, J., Octora, R., & Sirait, Y. H. (2016). Peranan Bank Penerbit Bank Garansi Sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen. *Dialogia Iuridica*, 7(2), 88-117.
- Imron, A. K., & Imanullah, M. N. (2017). Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 7-15.
- Kamal, H. (2020). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 57-67.
- Lubis, A. M. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).
- Manitik, W. (2018). Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. *Lex Privatum*, 6(7), 115-123.
- Maria S.W.Sumardjono, *Prinsip Dasar dan Isyu Di Seputar UUHT*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 1, 1997.
- Nadyanti, D., & Jayaputeri, T. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 100-117.

- Narayani, N. S., & Sudantra, I. K. (2020). PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TIDAK DIDAFTARKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN. 1-16.
- Nugroho, S. A. (2016). Analisis Yuridis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Mengenai Roya Partial (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Medan). *Premise Law Journal*, 21, 165040, 1-21.
- Nur, D., & Putra, A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan. *Adil Jurnal Hukum*, 1(3), 420-438.
- Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.
- Pamungkas, N. A., Hariyadi, M. R., Paskalis, T., & Ramadhan, M. F. (2023). Penyelesaian Sengketa Objek Hak Tanggungan Yang Diambil Debitur Dengan Surat Pelunasan Hutang Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt. G/2019/PN Kpn). *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 97-115.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1).
- Priambodo, B. B. (2025). Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang. *UNES Law Review*, 7(3), 1221-1233.

- Putra, B. H., & Suryono, A. (2020). Kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kebendaan berdasarkan undang-undang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 57-62.
- Rachman, H. (2022). Batasan Tanggung Jawab Hukum Penjamin Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Sel) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Rahmanda, B. (2019). Perlindungan hukum bagi pengusaha pemilik tanah akibat musnahnya tanah oleh bencana alam dan kaitannya dengan pihak ketiga. *Gema Keadilan*, 6(1), 63-74.
- Satrio, J. (1998). Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan, hak tanggungan. Citra Aditya Bakti.
- Shidiq, A. (2021). Problematika Pembebasan Tanah Di Bantaran Sungai Bengawan Solo Yang Masih Terbebani Hak Tanggungan Di Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Suhantri, Y. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir Masa Berlakunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo Dilihat Dari Aspek Hukum Hak Tanggungan. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Sukariyanti, D., & Tarliman, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Rona Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 117-125.
- Supianto, & Budiman, N. T. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(2), 186-217.

Suwarjono, A., Sinaga, N. A., & Sudarto, S. (2023). Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(2).

Usman, R. (1999). Pasal-pasal tentang hak tanggungan atas tanah. Penerbit Djambatan.

Wawancara dengan Andri Budiman, SH, SE, M.Kn, Notaris, 20 May 2025.

Wawancara dengan Darman Satia Halomoan Simanjuntak, SH, MH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, 22 may 2025

Wawancara dengan Imron, SH, M.Kn, Notaris, 20 May 2025

Wawancara dengan Tedy Septiadi, SH, Kordinator Subseksi (Roya)

Wawancara dengan Muhamad Darjat Supriatna, SH, Koordinator Subseksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, 22 May 2025

Yuslim, Iswandi, & Fendi, A. (2023). Pelaksanaan Pencoretan Hak Tanggungan (Roya) Pada Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 5(4), 4228-4246.

2. Artikel

Arfian, D. (2025, 02 05). *Radarbekasi.id*. Retrieved from Menteri Nusron Wahid Ungkap Indikasi Manipulasi Data 581 Hektare Lahan di Area Pagar Laut Tarumajaya: <https://radarbekasi.id/2025/02/05/menteri-nusron-wahid-ungkap-indikasi-manipulasi-data-581-hektare-lahan-di-area-pagar-laut-tarumajaya/>